

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara sedang berkembang, Indonesia memiliki beberapa rintangan dalam pembangunan, diantaranya adalah kemiskinan, rendahnya modal, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah pembangunan yang harus segera diatasi, selain masalah keamanan dan politik yang tidak stabil. Hal ini, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Setiap daerah akan berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Penting dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan berarti terjadi pengaruh positif pada pembangunan ekonomi sendiri. Kenaikan pembangunan ekonomi akan berdampak pula pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Boediono (1981) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, sedangkan pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk

menghasilkan barang dan jasa diharapkan mengalami peningkatan. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah kualitasnya (Sukirno, 2004:9).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Dalam suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Itu jika dalam suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan. Melihat laju pertumbuhan ekonomi pada tujuh kabupaten/kota di karesidenan Surakarta, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Tujuh Kabupaten/Kota di
Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Surakarta	22.848.439	24.123.782	25.612.681	26.955.056	28.453.494
Boyolali	14.592.026	15.369.974	16.265.749	17.085.662	18.189.698
Klaten	18.071.351	19.102.403	20.299.991	21.391.718	22.622.660
Wonogiri	13.786.711	14.605.088	15.305.298	16.109.708	16.975.074
Sukoharjo	17.319.639	18.342.247	19.403.139	20.423.512	21.555.551
Sragen	16.870.231	17.902.105	19 102 982	20.170.943	21.396.758
Karanganyar	17.205.064	18.189.077	19.224.636	20.208.968	21.360.144

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Berbagai Edisi.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Menurut Todaro (2003:92), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor itu adalah (1) akumulasi modal, yang meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia (2) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan (3) kemajuan teknologi.

Ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah akan kekurangan modal (Hendra, 1991). Konteks inilah pemerintah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk dalam partisipasi ini adalah penanaman modal atau investasi.

Sumber daya yang dimiliki, Karesidenan Surakarta mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktivitas penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta volume perdagangan ke luar negeri (ekspor) untuk menambah cadangan devisa. Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal yang baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan mengurangi angka pengangguran.

Investasi (PMA dan PMDN) bisa di manfaatkan oleh negara berkembang sebagai dasar yang signifikan untuk memacu kenaikan serta pertumbuhan ekonomi, demi menjaga dan mempertahankan tingkat

pertumbuhan yang lebih tinggi dengan perubahan yang substansial dalam struktur produksi dan perdagangan, modal asing dan modal dalam negeri yang sangat berperan penting dalam mobilisasi sumber dana transformasi structural, dan yang terakhir modal asing dan modal dalam negeri akan menurun jika setelah perubahan structural terjadi. Indonesia realisasi penanaman modal masih sangat kecil, ini disebabkan karena kurang maksimalnya upaya mendorong realisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Yuswar, Mulyadi, 2003:104).

Selain kekurangan modal, Indonesia juga mengalami tekanan penduduk dan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar tersebut ternyata belum diimbangi oleh kegiatan ekonomi yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan sosial ekonomi yang serius yaitu pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan juga semakin meningkatnya angka kriminalitas yang berdampak dengan aspek keamanan dan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian itu sendiri.

Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan aspek sosial ekonomi yang terpojok. Hal tersebut mempengaruhi produktivitas sosial menurun. Kebijakan dan program pembangunan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja (Tjokromidjojo, 1994).

Setiap sektor perekonomian atau lapangan pekerjaan memiliki daya serap tenaga kerja dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja serta terjadinya perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perannya dalam pendapatan nasional. (Simanjuntak, 1998).

Dalam peningkatan kenaikan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) pemerintah juga ikut andil dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi tersebut. Anggaran pengeluaran pembangunan daerah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat beserta peningkatan pelayanan masyarakat dan perluasan tenaga kerja. Dan kenyataannya masih banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah khususnya.

Mengukur maju tidaknya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang dilihat dari kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB). Uraian tersebut di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil judul “ANALISIS DATA PANEL PENGARUH INVESTASI, IPM, ANGKATAN KERJA, UMR, DAN INFLASI TERHADAP PDRB SEKARISEDENAN SURAKARTA TAHUN 2011-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh Indek Pembangunan Manusia terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015
2. Mengetahui pengaruh Indek Pembangunan Manusia terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015
3. Mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015

4. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015
5. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap PDRB di Karesidenan Surakarta tahun 2011-2015

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi investasi, ipm, angkatan kerja, umr, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan dapat dijumpai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada pokok bahasan ini akan diuraikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dikaji lebih dalam mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, cara penulisan menentukan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan penulis, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Pada bagian deskripsi obyek penelitian dibahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

Bab V Penutup

Merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pembentukan kebijakan.